

PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MEMAJUKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Ratu Linda Martina Andryani*¹, Zulfitria²

^{1,2}, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

^{1,2}, ratulindamp@gmail.com, zulfitria@umj.ac.id

*ratulindamp@gmail.com

Abstract (English)

This research aims to explain the role of education boards in advancing the quality of education. The method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques are carried out using literature studies that examine theories relevant to the research problem. The provision of education is very important and strategic in determining the future of government administration and development. The research results show that the Education Council as a representative of the community must be able to become a strategic partner of the city government whose role is to convey the aspirations of the educational community in various educational policies issued by the government. The Education Council needs to understand the educational problems faced by the community so that it can provide suggestions, input, and recommendations for solutions to realize the role of the Education Council. The main functions, roles, and duties of the Education Council have been regulated by existing regulations or laws so that they do not overlap with related institutions or agencies.

Article History

Submitted: 22 May 2024

Accepted: 1 June 2024

Published: 2 June 2024

Key Words

Role, Education Council, Quality of Education

Abstrak (Indonesia)

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan tentang peran dewan pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Studi kepustakaan yang melihat teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian digunakan untuk memperoleh data. Menentukan masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penyelenggaraan pendidikan menjadi sangat penting dan strategis. Hasil penelitian bahwa Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah kota yang berperan menyampaikan aspirasi masyarakat pendidikan dalam berbagai kebijakan, Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan departemen perlu memahami permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu memberikan saran, masukan dan rekomendasi penyelesaian dalam rangka mewujudkan peran Dewan Pendidikan. Fungsi, peran dan tugas pokok Dewan Pendidikan telah diatur oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak tumpang tindih dengan lembaga atau dinas terkait.

Sejarah Artikel

Submitted: 22 May 2024

Accepted: 1 June 2024

Published: 2 June 2024

Kata Kunci

Peran, Dewan Pendidikan, Kualitas Pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam proses peningkatan standar pendidikan, Dewan Pendidikan berperan penting. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan adalah sebuah proses yang berkesinambungan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah dan sektor swasta berupaya memenuhi mandat ini dengan mengembangkan pendidikan berkualitas melalui berbagai cara, termasuk pengembangan, penyempurnaan kurikulum, sistem penilaian, perbaikan infrastruktur, penyediaan bahan ajar, dan pelatihan bagi para pendidik. Sebab, mereka menekankan pentingnya proses peningkatan umur manusia. (Lukman, 2019: 1)

Menurut Pasal 1 dan Ayat 2 Sistem Pendidikan Nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, landasan pendidikan adalah seperangkat pedoman dan cara penyelenggaraan pendidikan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat umum, dunia pendidikan, militer, dan warga negara, baik secara individu maupun kolektif.

Evolusi sosial budaya suatu masyarakat dan aspek kehidupan lainnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diberikan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik mewujudkan potensi dirinya dan menjadi warga negara yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, yang mempunyai rasa keimanan dan ketaqwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Guna meningkatkan taraf kecerdasan masyarakat dan memajukan akhlak mulia dan kebudayaan bangsa..

Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah kota yang berperan menyampaikan aspirasi masyarakat pendidikan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dewan Pendidikan perlu memahami permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu memberikan saran, masukan dan rekomendasi penyelesaian dalam rangka mewujudkan peran Dewan Pendidikan. Fungsi, peran dan tugas pokok Dewan Pendidikan telah diatur oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak tumpang tindih dengan lembaga atau dinas terkait.

Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan dewan pendidikan. Dengan menawarkan konsultasi, bimbingan, dan dukungan bagi staf, sarana prasarana, dan infrastruktur serta pengawasan pendidikan di tingkat federal, provinsi, dan kabupaten/kota, dewan pendidikan berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dewan pendidikan beroperasi atas inisiatifnya sendiri dan dengan profesionalisme. Tugas dewan pendidikan adalah menghimpun, mengevaluasi, dan melaporkan kepada menteri, gubernur, bupati, atau walikota mengenai tujuan masyarakat dalam bidang pendidikan serta keluhan, gagasan, dan kritiknya.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 menjadi landasan awal berdirinya Dewan Pendidikan, suatu badan organisasi yang bertugas membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional semakin menyempurnakan hal tersebut.

Dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu berkomitmen. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat terhadap paradigma pendidikan kedepannya akan berubah demi kemajuan negara ini. Sebaliknya, anggaran untuk bidang lain seperti pembangunan infrastruktur dan perekonomian tampaknya bisa dua kali lebih besar dibandingkan anggaran untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah terus menaruh perhatian besar pada pembangunan fisik. Asia, yang kaya akan sumber daya manusia (SDM) namun miskin sumber daya alam (SDA), seperti Korea, harus mulai mempertimbangkan untuk membangun SDM berkualitas tinggi saat ini guna meningkatkan posisi negara tersebut di pasar global. (Fadhilah, 2019: 4)

Adapun permasalahan yang ada terdapat kurangnya ketersediaan pendidik dan fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil. Di dunia modern, pendidikan diakui sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi, sukses, dan produktif. Tanpa menjalani pendidikan, baik resmi maupun informal, seseorang tidak dapat beraktivitas di

masyarakat. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah proses pendidikan akan terhambat atau mungkin terhenti tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Hal ini tentu akan menurunkan efektivitas pembelajaran selama proses pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Dewan Pendidikan Dalam Memajukan Kualitas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Peran Dewan Pendidikan dalam memajukan kualitas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini bagi orang tua dan masyarakat ialah dapat menjadi pijakan dalam memajukan kualitas Pendidikan di luar sekolah.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa tulisan yang relevan menurut penulis dengan artikel ini adalah, pertama, Jurnal oleh Lukman Asha, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 3, no. 1, Mei 2019, dengan judul: “*Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong.*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dewan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong terhadap peningkatan standar pendidikan saat ini. Temuan penelitian ini menekankan kontribusi Dewan Pendidikan dalam meningkatkan standar pengajaran di Kabupaten Rejang Lebong, Indonesia. Dewan Pendidikan memainkan peran penting ketika merumuskan dan melaksanakan strategi pendidikan dalam menentukan, memberikan dukungan dalam hal keuangan, pemikiran, energi, memastikan transparansi akuntabilitas dalam administrasi dan output pendidikan, serta bertindak dalam kapasitas sebagai perantara antara masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemerintah. Dewan Pendidikan juga terlibat dalam kegiatan seperti merumuskan dan melaksanakan program unggulan sekolah, mengintensifkan keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan, dan berkontribusi pada pengembangan desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penelitian ini menekankan perlunya sistem pendidikan yang demokratis, terbuka, dan efektif dengan keterlibatan masyarakat setempat dan didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal dan faktor sosio-demografis. Temuan menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan masukan, dukungan, dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. (Lukman, 2019)

Kedua, Jurnal oleh Aco Nata Saputra, Jurnal Ilmu Sosial Politik Volume 5. No. 1. (2022), dengan judul: “*Peranan Dewan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo.*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dewan Pendidikan Kota Palopo menjalankan kebijakan terkait pendidikan. Hasil dari jurnal ini menyoroti pentingnya pendidikan terdesentralisasi dan peran Dewan Pendidikan dalam menerapkan kebijakan pendidikan di kota Palopo. Studi ini menekankan perlunya pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), untuk memberdayakan sekolah dalam pengembangan program, manajemen infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan. Kegiatan Dewan Pendidikan meliputi eksplorasi kolaborasi, pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan, dan pelaporan perkembangan pendidikan di kota Palopo. Temuan ini memiliki implikasi untuk meningkatkan sifat demokratis, transparan, dan akuntabel manajemen pendidikan di tingkat lokal. (Aco, 2022)

Ketiga, Jurnal oleh Dewi Nefina, Luthfi Zihni Rahman, dan Nove Kurniati Sari, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Volume 11 (3), 2021, dengan judul: “*Peran Dewan Pendidikan terhadap Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam.*”

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta menentukan dan menerapkan kebijakan yang menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai potensi maksimalnya. Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta tidak membatasi fokusnya pada pendidikan Islam, menurut temuan jurnal tersebut, karena semua agama sama-sama termasuk dalam kelompok pendidikan karakter. Pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan kepribadian yang lengkap dan komprehensif, baik secara fisik maupun mental. Pendidikan memiliki dampak signifikan pada perkembangan sosial dan posisi individu dalam kehidupan mereka. Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, sebagai badan yang dibentuk pemerintah, mempromosikan partisipasi aktif dan aspirasi masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan. Peran Dewan Pendidikan termasuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan pengawasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur. (Luthfi, 2021)

Keempat, Jurnal oleh Rizki Kurniawan dan Hestin Febbia Andriani, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (3) (2021), dengan judul: “*Pentingnya Kualitas Pendidikan Sebagai Pembentukan Karakteristik Seorang Pemimpin Di Indonesia.*” Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia untuk melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang lebih bermoral. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter pemimpin masa depan di Indonesia. Ini berpendapat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam memajukan kualitas pendidikan di negara ini. Hambatan utama dalam mengembangkan pemimpin melalui pendidikan di Indonesia adalah kelangkaan guru dan sumber daya pendidikan, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendidikan dan hilangnya harapan untuk melahirkan pemimpin yang mampu memajukan negara. Indonesia, dengan populasi yang besar dan keanekaragaman budayanya, memiliki potensi untuk negara yang kaya dan terhormat mengingat luas dan keragaman budayanya. Negara ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung perkembangannya, dan pendidikan memainkan peran penting dalam hal ini. (Rizki, 2021)

Berdasarkan penjielsan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya membahas peran dewan pendidikan tersebut penting dalam memajukan kualitas pendidikan. Adapun perbedaannya lebih memfokuskan dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tinjauan pustaka melihat dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian digunakan dalam prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat beberapa sumber untuk studi literatur, antara lain buku, jurnal, perpustakaan, dokumen, dan internet. Untuk menarik kesimpulan, data yang terkumpul dikaji, diperiksa, diolah, dan disimpulkan. (Nursalam, 2016:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Pendidikan

Istilah “pendidikan” berasal dari bahasa Yunani “didik”, yang menjadi “mendidik” jika diawali dengan “me”. Definisi ini berkonotasi dengan pengasuhan dan pelatihan. Pengajaran, tuntutan, dan kepemimpinan dalam hal moralitas dan kecerdasan diperlukan untuk menegakkan dan menawarkan pelatihan. Pendidikan adalah usaha yang bertujuan dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Fadhilah, 2019: 6)

Otonomi dalam pendidikan merupakan nama lain dari pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu proses penggunaan petunjuk dan pelatihan upaya untuk membantu sekelompok orang dalam mengubah sikap dan perilaku manusia menjadi dewasa. (Lukman, 1991: 232) Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu usaha untuk mengembangkan watak, budi, dan jasmani anak guna membantu mereka mencapai tujuan akhir hidup, yaitu hidup damai dengan masyarakat dan alam serta membesarkan keturunan di dalamnya. (Surjomihardjo, 1986)

Dapat disimpulkan pendidikan adalah upaya sadar untuk mendukung siswa dalam mewujudkan potensi terbesar mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Hal-hal tersebut mencakup kualitas-kualitas seperti kekuatan spiritual, pengendalian diri, pengetahuan, karakter terpuji, kepribadian, dan kemampuan yang dibutuhkan orang-orang dalam masyarakat dan sebagai individu.

B. Tujuan Pendidikan dan Dewan Pendidikan

Pendidikan berupaya untuk menghasilkan individu-individu yang berkualitas dan berkarakter moral yang dapat dengan cepat dan akurat beradaptasi dengan berbagai situasi, memiliki perspektif luas tentang masa depan, dan mencapai tujuan mereka. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan menginspirasinya untuk meningkatkan segala aspek kehidupannya ke depan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia seutuhnya serta kehidupan bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Karena pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan intelektualitas dan kemampuan manusia, maka kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia..

Dewan Pendidikan bertujuan sebagai berikut:

- a. Mewadahi, mengarahkan upaya dan aspirasi masyarakat terhadap terselenggaranya kebijakan dan program pendidikan yang bermutu.
- b. Memperluas akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, koordinasi, pelayanan, pengawasan, dan penilaian inisiatif pendidikan.
- c. Membangun lingkungan dan keadaan yang kondusif, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis bagi proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemberian layanan pendidikan yang bermutu tinggi.

Menurut UUD 1945, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kecerdasan di seluruh negeri. Islam mengakui nilai pendidikan lebih dari 1.400 tahun yang lalu dan perannya dalam mencerdaskan negara. Umat manusia dihimbau untuk membaca dan belajar Ayat pertama yang diturunkan Allah adalah Surat Al-'Alaq. Orang-orang yang bermoral dan berkualitas tinggi memerlukan modal, yaitu informasi dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, yang dapat berkisar dari agenda anak usia dini hingga pelatihan kerja bagi orang dewasa. (Fadhilah, 2019: 8) Ini memerlukan pengeluaran finansial untuk waktu belajar, perpustakaan, dan guru, untuk meningkatkan tingkat sumber daya manusia. Menurut Sukirno, Pertumbuhan ekonomi dapat memperoleh manfaat besar dari investasi di bidang pendidikan. (Sukirno, 2004).

C. Peran Dewan Dalam Memajukan Kualitas Pendidikan

Keberhasilan penerapan otonomi pendidikan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah; hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pengambil kebijakan di daerah pemerintah harus mampu melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan generasi penerus bangsa. (Fadhilah, 2019: 20-21).

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan menyeluruh dilandasi oleh prinsip demokrasi, dengan pusat otonomi berada pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Menurut PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur Kaitannya dengan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, kewenangan pemerintahan dalam kelompok sektor pendidikan dan kebudayaan meliputi:

- 1) Penetapan kurikulum nasional, data penilaian hasil pembelajaran nasional, pedoman pelaksanaan, dan kriteria kompetensi peserta didik dan peserta didik.
- 2) Menetapkan kriteria untuk topik utama.
- 3) Menetapkan kondisi yang diperlukan untuk memperoleh dan menggunakan gelar akademik.

Setiap lembaga mempunyai kekuasaan dan pedoman yang diperlukan untuk mengontrol bagaimana pendidikan dilaksanakan di wilayahnya. Sistem pendidikan yang kuat tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan sumber daya manusia di daerah jika diterapkan dengan baik mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pelajar. Tentu saja, pertumbuhan basis sumber daya manusia di wilayah ini dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan inisiatif pendidikan. Penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan biasanya merupakan akar penyebab permasalahan di suatu lokasi. Tentu saja diperlukan solusi untuk mencapai pemerataan pendidikan. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan negara memberikan prioritas untuk mengalokasikan paling sedikit 20% anggaran APBN untuk pendidikan. Peran Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong perluasan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam mengatur, mengawasi, dan menilai hasil inisiatif pendidikan berkualitas tinggi.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah, masyarakat, dan DPRD untuk merancang, mengatur, mengawasi, dan menilai hasil inisiatif pendidikan yang bermutu.
- 3) Menghadiri dan mengevaluasi tujuan, konsep, dan kebutuhan pendidikan anggota masyarakat yang beragam.
- 4) Memberikan saran, gagasan, dan pemikiran kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berhubungan dengan:
 - a) Kebijakan dan Program Pendidikan.
 - b) Standar dan Prestasi Bidang Pendidikan dan Guru.
 - c) Kriteria Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - d) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Adapun Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan bertugas:

- a. memberikan pemikiran, bimbingan, dan bantuan untuk staf, sumber daya, dan infrastruktur di samping mengawasi pendidikan;

- b. mengumpulkan, mengkaji, dan menyampaikan rekomendasi kepada walikota mengenai keluhan, gagasan, kritik, dan tujuan masyarakat terhadap pendidikan; dan
- c. memberitahukan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas melalui media cetak, media elektronik, website, rapat, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan hal tersebut pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kota Tangerang Selatan perlu membentuk dewan pendidikan. Masa bakti Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2027. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, rekomendasi panitia menjadi dasar pemilihan walikota dan pengangkatan anggota dewan pendidikan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan manajemen sekolah mengingat peluang dan kesulitan yang dihadapi setiap sekolah. Dengan melakukan hal ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya untuk digunakan dalam membuat atau mengedit rencana kerja sekolah sebagai bahan evaluasi diri mereka.

Berdasarkan uraian di atas terdapat kajian terdahulu oleh Lukman Asha, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 3, no. 1, Mei 2019, dengan judul: “*Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong.*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dewan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan taraf pendidikan selama ini. Hasil penelitian menyoroti peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong, Indonesia. Dewan Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan, memberikan dukungan dalam hal keuangan, pemikiran, energi, memastikan transparansi akuntabilitas dalam administrasi dan output pendidikan, serta bertindak sebagai Dewan Pendidikan juga terlibat dalam kegiatan seperti merumuskan dan melaksanakan program unggulan sekolah, mengintensifkan keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan, dan berkontribusi pada pengembangan desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penelitian ini menekankan perlunya sistem pendidikan yang demokratis, transparan, dan efisien yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal dan faktor sosio-demografis. Temuan menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan masukan, dukungan, dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan.

Hasil penelitian temuan yang penulis teliti dari kajian kepustakaan ialah peran dewan Pendidikan sangat penting dalam memajukan kualitas Pendidikan, dapat penulis teliti dari masing-masing tujuan Pendidikan dan peran dewan pendidikannya. Adapun Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat yang mana harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah kota yang berperan menyampaikan aspirasi masyarakat pendidikan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dewan Pendidikan perlu memahami permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu memberikan saran, masukan dan rekomendasi

penyelesaian dalam rangka mewujudkan peran Dewan Pendidikan. Fungsi, peran dan tugas pokok Dewan Pendidikan telah diatur oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak tumpang tindih dengan lembaga atau dinas terkait.

PENUTUP

Simpulan

Inovasi di bidang pendidikan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Tangsel dan elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan di berbagai sektor. Tugas Dewan Pendidikan termasuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang masukan dan aspirasi masyarakat terkait pendidikan. Dewan Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan memberikan saran, arahan, dukungan sumber daya, dan pengawasan, guna mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat Tangerang Selatan. Sebagai representasi masyarakat, Dewan Pendidikan harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi pendidikan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, terutama Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dewan Pendidikan aktif membangun sinergi dan kolaborasi, serta menjaga komunikasi efektif dengan semua pemangku kepentingan pendidikan, demi kelancaran pembangunan pendidikan yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat pendidikan.

Saran

Tujuan dari Dewan Pendidikan adalah meningkatkan taraf sumber daya manusia guna meningkatkan standar pendidikan di Kota Tangsel. Mutu pendidikan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia. Misalnya, pemerintah dapat berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan.

Keterbatasan

Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih memahami peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan standar pendidikan berkat temuan penelitian ini. Perlu adanya perubahan pada variabel independen baik dengan penambahan variabel maupun data time series, khususnya bagi individu yang tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh peran Dewan Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangsel. Dengan demikian, penelitian akan dilakukan secara lebih obyektif dan beragam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pembaca.

REFRENSI

Fadhilah dan Syahril. (2019). Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi pemikiran, riset dan pengembangan Pendidikan Islam*. Vol. 7, No. 1.

Keputusan Permendiknas RI Nomor: 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf (di akses pada 15 Februari 2024)

- Kurniawan Rizki, dan, Hestin Febbia Andriani. (2021). Pentingnya Kualitas Pendidikan Sebagai Pembentukan Karakteristik Seorang Pemimpin Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (3). 407-411
- Lukman, Ali (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lukman, Asha (2019). Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* vol. 3, no.(1).
- Nefina, Dewi et al. (2021). Peran Dewan Pendidikan terhadap Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*. Volume 11 (3). 222-237.
- Nursalam. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Ed. 4. Jakarta: Salemba Medika
- Sadono, Sukirno. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saputra, Aco, Nata. (2022). Peranan Dewan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*. Volume 5. No. 1.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. (1986). *Ki Hajar Dewantara Dan Taman Siswa Dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 2.